



# LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2023



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KABUPATEN TABANAN**

**JL. GATOT SUBROTO NO.2 KEDIRI  
TLP.(0361) 811171  
2023**

## KATA PENGANTAR

Atas asung kerta waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) kami bersyukur dapat menyusun Laporan Tahunan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023.

Penyusunan laporan ini adalah hal yang wajib dilakukan oleh setiap unit kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam kerangka *good governance* seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perpres tersebut mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang diambil. Laporan tahunan ini memberikan gambaran kinerja BPBD dalam pembangunan daerah.

Rampungnya laporan ini tidak terlepas dari komitmen dan kerja keras aparatur BPBD. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan data dan informasi sehingga laporan ini selesai tepat pada waktunya.

Dengan berbagai keterbatasan yang ada, dimohon masukan dan sarannya agar lebih meningkatnya kinerja Badan Penanggulangan Bencana secara berkelanjutan untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang tertuang dalam rencana startegis tahun 2021-2026

Tabanan, 10 Januari 2024



**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum .....	2
1.3 Tujuan .....	3
BAB II Gambaran Umum BPBD .....	3
2.1 Kondisi Administratif .....	3
2.2 Kondisi Geografis Wilayah .....	3
2.3 Pemetaan Risiko Bencana.....	3
2.4 Dukungan Sumber Daya Aparatur.....	5
BAB III RENCANA KERJA .....	6
3.1 Pengukuran SPM .....	6
3.2 Pengukuran IKT .....	6
3.3 Pengukuran IKU .....	6
3.4 Pengukuran IKP .....	7
3.5 Pengukuran IKK .....	7
BAB IV KINERJA PEMBANGUNAN .....	9
4.1 Capaian Kinerja .....	9
4.2 Capaian Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana.....	12
4.3 Capaian Tanggap Bencana dan Penyaluran Logistik .....	13
4.4 Capaian Rekonsiliasi dan Rehabilitasi .....	14
4.5 Pengelolaan Aset.....	15
4.6 Pengelolaan Keuangan .....	15
4.7 Prestasi Pembangunan .....	15
BAB V PENUTUP .....	16
4.1 Kesimpulan .....	16
4.2 Saran .....	16

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang.**

Pemerintah Indonesia sangat berkomitmen dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui Indonesia Tangguh Bencana (*Resilien*) untuk Pembangunan Berkelanjutan 2045. Perencanaan pembangunan telah diarahkan untuk adanya sinergitas prioritas pembangunan pusat dan daerah. Perencanaan dalam penanggulangan bencana disusun dan ditetapkan agar seluruh kegiatan pada setiap tahapan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan terkordinasi, terpadu, terarah dan menyeluruh dengan baik.

Pemerintah pusat telah menetapkan Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2040, dimana dalam Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) melalui tiga strategi yaitu : 1). Rencana aksi dalam bentuk mitigasi bencana, 2).Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dalam bentuk rencana kontigensi, dan 3). Rencana pemulihan prabencana dalam bentuk rencana rekuntruksi dan rehabilitasi pasca bencana.

Prioritas pembangunan Provinsi Bali telah sinergis dengan prioritas pembangunan Kabupaten Tabanan, sehingga dalam kebencanaan sesuai prioritas ketiga yakni jaminan sosial dan ketenagakerjaan maka pemerintah daerah terus berinovatif dalam mewujudkan daerah aman dan nyaman sehingga perekonomian dan inventasi dapat berkembang.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan telah menetapkan strategi dalam manajemen bencana dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang dihadapi sehingga dapat melakukan inovasi program dan kegiatan prioritas. Adapun isu strategis yang dihadapi dan prioritas ditangani di tahun 2023 yaitu : 1). Pelayanan informasi (edukasi) rawan bencana kepada multi pihak, 2). Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana untuk investasi pembangunan, 3). Pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana untuk pulih lebih cepat (*risilien*).

Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah berupaya menangani isu stategic yang dihadapi dengan program prioritas baik yang sumber dananya dari APBN maupun APBD agar multi pihak (*stakeholder*) semuanya dapat memenuhi harapan pemerintah pusat maupun daerah untuk menjadi tanggap, siaga, dan tangguh dalam menghadapi risiko bencana.

Peran birokrasi yang akuntabel dalam melaksanakan amanah RPJMD Semesta Berencana khususnya dalam manajemen bencana menjadi tuntutan yang

harus segera direspon oleh semua *stakeholder*. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia Tahun 2010-2025. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan *good and clean government* yang telah ditetapkan melalui percepatan implementasi reformasi birokrasi. Dengan demikian, pemerintah melakukan penataan kembali terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, dimana birokrasi akan menjadi tulang punggung perubahan yang didukung oleh aparatur berakhhlak

### **1.2. Landasan Hukum.**

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
4. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan
5. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan
6. Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/695/01/HK/2023 tanggal Pembentukan Tim Data Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

### **1.3. Tujuan.**

1. Memberikan gambaran umum potensi wilayah Kabupaten Tabanan.
2. Memberikan informasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mendukung misi pertama RPJMD Semesta Berencana dalam mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman).

## II. GAMBARAN UMUM BPBD

### 2.1 Kondisi Administratif

Luas wilayah Kabupaten Tabanan adalah 839,33 Km<sup>2</sup> atau sekitar 14,90% dari luas Provinsi Bali. Secara administratif terbagi menjadi 10 (sepuluh) kecamatan dan terdiri atas 133 (serratus tiga puluh tiga) desa, 344 desa adat, 816 banjar adat. Wilayah Kabupaten Tabanan di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Buleleng, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Badung, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jembrana. Letak wilayah Kabupaten Tabanan cukup strategis karena berdekatan dengan ibukota provinsi dengan jarak 25 Km. Secara geografis berada pada posisi 8°14'30"-8°30'07"LS d, 114°54'52" – 115°12'57".

### 2.2 Kondisi Geografis Wilayah

Secara geografis berada pada posisi 8°14'30"- 8°30'07"LS d, 114°54'52" – 115°12'57".

#### a. Kondisi tutupan lahan

Kabupaten Tabanan didominasi oleh tutupan / penggunaan lahan pertanian dan perkebunan. Tutupan lahan hutan banyak ditemui di bagian utara yang memiliki ketinggian lebih dari 500 mdpl, dengan topografi / kelerengan 3-15%.

#### b. Kondisi bentuk lahan

Kabupaten Tabanan memiliki bentuk asal proses vulkanis, yang berasal dari gunung vulkanik pirba di sebelah utara, tepatnya di pegunungan catur. Bentukan vulkanik ini dalam prosesnya membentuk morfometri dan morfosekuensi yang beraneka ragam, mulai dari sisi utara sampai bagian selatan wilayah Kabupaten Tabanan. Tekstur tanah sebagai besar memiliki tekstur geluh-pasiran, dimana tekstur tanah ini sangat cocok ditanami tanaman pertanian maupun perkebunan.

### 2.3 Pemetaan Risiko Bencana

Risiko bencana dapat diuraikan sebagai fungsi dari bahaya (hazard) dan kerawanan (*vulnerability*), yang dapat dikombinasikan dengan kemampuan untuk mengatasi bencana (*coping capacity*).

Ancaman bencana di Kabupaten Tabanan diidentifikasi ada 12 (dua belas) kelompok ancaman : 1). Bencana geologi seperti gempa bumi, tsunami, gunungapi, tanah longsor, 2). Bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir abndang, kekeringan, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, 3). Bencana

antropogenik berupa epidemik atau wabah penyakit dan kegagalan teknologi/ kecelakaan industri. Seluruh potensi bencana dapat menimbulkan dampak korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

a. Bahaya cuaca sekstrim

Cuaca ekstrim dalam hal ini adalah angina kencang merupakan angina dengan kecepatan 120 km/jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis di antara agraris balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat dekat dengan khatulistiwa. Angin ini disebabkan antara lain perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca seperti peningkatan tekanan udara maupun adanya pergerakan semu matahari secara tegak lurus dengan permukaan bumi (kulminasi).

b. Bahaya banjir

Daerah rawan banjir merupakan daerah yang sering atau berpotensi terjadi banjir berdasarkan besaran frekwensi kejadian atau berdasarkan parameter fisik yang berhubungan dengan karakteristik daerah banjir (*flood plain*) di suatu wilayah. Kabupaten Tabanan dalam pemetaan rawan banjir dengan menggunakan dua pendekatan yakni : 1). Mengidentifikasi daerah genangan banjir dengan pendekatan geomorfologi suatu wilayah sungai yang dapat dkkalibrasi dengan ketersediaan data area dampak yang pernah terjadi, 2). Mengestimasi ketinggian genangan berdasarkan ketinggian elevasi (jarak vertikal) di atas permukaan sungai di dalam area potensi genangan.

c. Bahaya tsunami

Tsunami merupakan fenomena alam yang terjadi akibat aktivitas tektonik di dasar laut yang mengakibatkan pemindahan volume air laut dan berdampak pada masuknya air laut ke daratan dengan kecepatan tinggi. Ada 12 (dua belas) desa pesisir yang telah diidentifikasi rawan bahaya tsunami yang merhadapan langsung dengan lautan / samudra hindia.

d. Bahaya gerakan tanah lonsor

Tanah lonsor merupakan suatu proses perpindahan massa tanah atau bebatuan dengan arah miring dari kedudukan semula, sehingga terpisah dari masa yang mantap, karena peagruh gratifikasi dengan jenis gerakan berbentuk rotasi dan tranlasi.

e. Bahaya gempa bumi

Gempa bumi merupakan ancaman berupa intensitas guncangan di permukaan tanah pada saat terjadi gempa bumi yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur yang dapat menimbulkan korban. BPBD Kabupaten Tabanan telah memiliki Warning Receiver System sebagai alat pendeteksi informasi gempa di seluruh Indonesia. Alat ini merupakan milik BMKG yang ditempatkan di BPBD Tabanan dalam informasi gempa.

f. Bahaya gelombang ekstrim dan abrasi

Gelombang ekstrim merupakan gelombang tinggi yang ditimbulkan oleh efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Selain gelombang ekstrim di daerah pesisir sangat rawan abrasi atau erosi pantai yang merupakan pengikisan pantai oleh tanaga gelombang serta arus dan bersifat merusak. Ada 12 desa pesisir yang rawan ancaman ini sehingga diperlukan pengetahuan bagi seluruh masyarakat pesisir.

#### **2.4 Dukungan Sumber Daya Aparatur**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan visi dan misi pemerintah daerah didukung oleh sumber daya aparatur :

- a. Sumber daya PNS sebanyak 15 orang yang terdiri atas 1 orang Kepala Pelaksana, 1 orang Sekretaris, 3 orang Kepala Bidang, 1 orang Kepala Sub Bagian, 9 orang Fungsional Umum dan 0 orang Fungsional Tertentu, 12 tenaga non ASN administrasi, dan 35 orang Non ASN Tim Reaksi Cepat.
- b. ASN yang telah memiliki sertifikat teknis kebencanaan sebanyak 8 orang
- c. ASN yang telah memiliki sertifikat SAKIP RB sebanyak 2 orang.
- d. TRC yang telah memiliki sertifikat teknis tanggap bencana sebanyak 35 orang

### III. RENCANA KERJA

#### 3.1 Pengukuran Stándar Pelayanan Minimal

Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkolaborasi dalam pencapaian SPM urusan wajib dasar. Adapun SKPD yang berperan dalam pencapaian SPM terjaminnya pemenuhan hak pelayanan dasar warga : Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPRPKP, Satpol PP, BPBD, Dinas Sosial P3A. Adapun target kinerjanya seperti berikut ini.

SPM	Indikator tujuan	Formula	Target
Terjaminnya Pemenuhan Hak Pelayanan Dasar Warga	Rata-rata persentase Capaian SPM 6 Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial)	Realisasi SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dibagi target perencanaan dikalikan 100	100,0%

#### 3.2 Pengukuran indikator Kinerja Tujuan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkolaborasi dalam pencapaian indikator kinerja tujuan. Adapun *stakeholder* (Dinas LH, Dinas PUPR, Dinas Sosial P3A, Dinas Perhubungan) yang berperan dalam pencapaian indikator menurunkan Indeks Risiko Bencana yang dikukur dari evaluasi 71 indikator dan 284 pertanyaan penilaian IKD yang nilainya dikeluarkan oleh BNPB. Adapun target kinerjanya berikut ini.

Tujuan BPBD	Indikator tujuan	Formula	Target
Terwujudnya Tabanan tangguh mulai dari desa dalam menghadapi bencana	Menurunkan Indeks Risiko Bencana	Hasil evaluasi 71 indikator dan 284 pertanyaan penilaian IKD dari BNPB	143,87%
Terwujudnya Kualitas tata Kelola pemerintahan di OPD	Hasil Evaluasi penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai evaluasi penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	90,00%

#### 3.3 Pengukuran Indikator Kinerja Utama

Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkolaborasi dalam pencapaian indikator kinerja utama. Adapun *stakeholder* yang berperan dalam pencapaian 2 (dua) indikator ini adalah Aparatur BPBD, TRC, dan Satgas. Adapun target kinerjanya berikut ini.

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula	Target Kinerja
Terwujudnya Tabanan Tangguh mulai dari Desa dalam menghadapi Bencana	Pengurangan Risiko Bencana	Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan	Realisasi tanggap kebencanaan dibagi usulan dan pengaduan yang masuk dikalikan 100	100%
Terwujudnya Kualitas tata Kelola pemerintahan di OPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai LKjIP	Nilai reviu LKjIP dari Inspektorat	A (81)

### 3.4 Pengukuran Indikator Kinerja Program

Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkolaborasi dalam pencapaian indikator kinerja program. Adapun *stakeholder* yang berperan dalam pencapaian 2 (dua) indikator ini adalah Aparatur BPBD, TRC, dan Satgas. Adapun target kinerjanya berikut ini.

Program	Indikator Kinerja	Formula	Target Kinerja
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	Realisasi anggaran dalam mendunjang pelayanan setiap triwulan dibagi target anggaran triwulan dikalikan 100	100%
Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana	Realisasi penanganan prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana dibandingkan dengan usulan atau pengaduan masyarakat yang masuk dikalikan 100	100%

### 3.5 Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkolaborasi dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan. Adapun *stakeholder* yang berperan dalam pencapaian 8 (delapan) indikator ini adalah Aparatur BPBD, TRC, dan Satgas. Adapun target kinerjanya berikut ini

Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Target
Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	Jumlah kecamatan yang mendapatkan edukasi dan informasi rawan bencana	10 kecamatan
Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase wilayah yang memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	Realisasi wilayah kecamatan yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi target perencanaan dikalikan 100	100%
Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Prosentase penanganan darurat bencana pada setiap kejadian bencana	Realisasi wilayah kecamatan yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi target perencanaan dikalikan 100	100%
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja disusun	Jumlah jenis dokumen perencanaan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja dihasilkan setahun	3 dok
Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD	Realisasi adminsitasi keuangan dibagi target perencanaan administrasi keuangan dikalikan 100	100%
Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum BPBD	Realisasi adminsitasi umum dibagi target perencanaan administrasi umum dikalikan 100	100%
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan kantor	Realisasi penyediaan jasa penunjang urusan kantor dibagi target perencanaan penyediaan jasa penunjnag dikalikan 100	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya BMD yang menunjang urusan kantor	Realisasi pemenuhan BMD yang layak oeprasional dibagi target perencanaan pemenuhan BMD dikalikan 100	100%

## IV. KINERJA PEMBANGUNAN

### **4.1 Capaian Indikator Kinerja**

#### a. Capaian Indikator SPM

Capaian kinerja ini mendukung capaian indikator kinerja 6 SPM (rata-rata persentase capaian SPM 6 Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial). Bagian Tata Pemerintahan Setda mengkoordinasikan perangkat daerah BPBD, Kesbangpol, dan Satpol PP dalam pemenuhan kriteria kinerja TRANTIBUMLINMAS yang dinilai dalam aplikasi Kementerian Dalam Negeri : [spm.bangda. kemendagri.go.id/2021/capaian\\_pemda/ form/5102/2023](http://spm.bangda. kemendagri.go.id/2021/capaian_pemda/ form/5102/2023) dan nilainya dikeluarkan oleh Ditjen Pembangunan Daerah. Tahun 2023 capaian kinerjanya adalah .... atau masih dibawah target 100%. Hasil pengukuran kinerja seperti tabel berikut ini.

No	SPM	Indikator	Realisasi / tahun	
			2022	2023
1	Terjaminnya Pemenuhan Hak Pelayanan Dasar Warga	Rata-rata persentase Capaian SPM 6 Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial)	85,65	55,18

#### b. Capaian IKD

Capaian kinerja utama ini mendukung capaian indikator indikator kinerja tujuan BPBD dan indikator RPJMD SB yaitu :

- menurunkan indeks risiko bencana. Tahun 2023 dengan capaian .... atau di bawah target 100% dengan sumber data dari hasil evaluasi 71 indikator dan 284 pertanyaan penilaian indikator ketahanan daerah yang ditetapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- hasil evaluasi penilaian mandiri terhadap reformasi birokrasi yang difasilitasi Inspektorat dengan nilai ..... Hasil pengukuran kinerja seperti tabel berikut ini.

No	Tujuan	Indikator	Realisasi / tahun	
			2022	2023
1	Terwujudnya Tabanan tangguh mulai dari desa dalam menghadapi Bencana	Menurunkan Indeks Risiko Bencana	153,3	
2	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan di OPD	Hasil evaluasi penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	83,3	

### c. Capaian IKU

BPBD dalam mencapai 2 (dua) kinerja utama di tahun 2023 sudah mampu 100%. Hasil analisis sebagai berikut :

- Semua usulan atau pengaduan masyarakat akan kebencanaan telah dapat dilayani/ diselesaikan secara administarsi oleh manajemen BPBD dan secara teknis oleh TRC (Tim Reaksi Cepat) BPBD dengan dukungan 35 orang personal yang bertugas dua sip yang terbagi 4 (empat) kelompok sehingga 24 jam personal TRC siaga.
- Akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang dinilia oleh Isepktorat melalui dokumen LKjIP seagai bagain dari dokuemn SAKIP sudah memperoleh nilai 70,41 atau BB. Hasil pengukuran kinerja seperti tabel berikut ini

No	Sasaran	Indikator	Reaalisasi / tahun	
			2022	2023
1	Pengurangan Risiko Bencana	Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan	100%	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai LKjIP	62,25	70,41

### d. Capaian IKP

Pencapaian indikator kinerja dua program sudah 100% Hasil analisis sebagai berikut :

- persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD sudah terlaksana 100% dalam menunjang kelancaran aministrasi dan kelancaran pelayanan publik.
- prosentase penanganan prabencana, tanggap bencana, dan pasca bencana yang sudah terealisasi 100% dengan waktu tanggap bencana 24 jam 7 hari kerja. Hasil pengukuran kinerja seperti tabel berikut ini

No	Program	Indikator	Reaalisasi / tahun	
			2022	2023
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	100%	100%
2	Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana	100%	100%

#### e. Capaian IKK

Pencapaian 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan pada prabencana, tanggap bencana, dan pasca bencana didukung oleh 5 (lima) capaian indikator sub kinerja kegiatan yang sudah juga terealisasi 100% karena didukung 5 (lima) output masing-masing sub kegiatan yang sinergis dengan indikator 3 (tiga) kegiatan. BPBD telah melakukan penyempurnaan pelayanan sesuai SOP dan standar pelayanan sesuai pakta integritas dalam mendukung reformasi birokrasi. Hasil pengukuran kinerja seperti tabel berikut ini

No	Kegiatan	Indikator	Reaalisasi / tahun	
			2022	2023
1	Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	10 kec	10 kec
2	Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase wilayah yang memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	100%	100%
3	Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Prosentase penanganan darurat bencana pada setiap kejadian bencana	100%	100%
4	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	3 doku men	3 doku men
5	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD	100%	100%
6	Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum BPBD	100%	100%
7	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan kantor	100%	100%
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya BMD yang menunjang urusan kantor	100%	100%

#### 4.2 Capaian Kinerja Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah terus berupaya melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana sebagai suatu investasi bagi semua stakeholder dengan fokus pada masyarakat desa sesuai tujuan pemerintan yaitu

terwujudnya Tabanan tangguh dari desa. Adapun hasil kerja yang dilakukan sebagai berikut :

- disusunya kajian risiko bencana melalui kerjasama BPBD dengan pihak ketiga.
- disebarluaskannya baliho dan spanduk di daerah rawan bencana (pesisir pantai dan pegunungan / daerah teridentifikasi rawan bencana) dan informasi lainnya melalui facebook, website, dan media lainnya.
- sosialisasi kebencanaan yang diberikan kepada 53 orang.
- penguatan kelembagaan yang tahun 2023 difokuskan di Tegal Mengkeb dan desa Berembeng yang difokuskan mendapat edukasi kesiapsiagaan bencana menjadi desa tangguh bencana.

Pengumpulan data pencegahan bencana yang diusulkan masyarakat / program pemerintah melalui edukasi dan sosialisasi direkap dan dilaporkan setiap bulan atau sewaktu-waktu diperlukan pimpinan daerah. Adapun kegiatan edukasi dilaksanakan di 10 kecamatan.

#### 4.3 Capaian Tanggap Bencana dan Penyaluran Logistik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Pasal 1 dan Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa waktu tanggap adalah waktu yang dibutuhkan dalam serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat info masuk kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Untuk memenuhi serangkaian kegiatan tersebut disepakati durasi waktu Tanggap maksimal 24 jam agar kejadian segera dapat penanganan awal.

Koordinasi data dengan instansi terkait (instansi pemerintah, TNI, Polri, PMI, Satgas, Forum, Swasta, Tagana, Basarnas, desa, dan lainnya)

Pengumpulan data kebencanaan dan pelayanannya berbasis aplikasi yang diinput sebagai hasil Tim Reaksi Cepat dalam menangani permohonan masyarakat yang terdampak bencana atau berisiko terdampak bencana. Data tersebut selain dapat diketahui setiap hari juga direkap dan dilaporkan setiap bulan atau sewaktu-waktu diperlukan pimpinan daerah (Bupati, Gubernur, BNPB). Adapun rekap data tanggap bencana seperti berikut ini.

Tabel Kejadian bencana dan reaksi cepat penanganan bencana BPBD

No	Kejadian bencana	Tahun 2021 Per kejadian	Tahun 2022 Per kejadian	Tahun 2023 Per kejadian
1	Pohon tumbang	114	155	108
2	Tanah longsor	155	219	198
3	Kebakaran	30	39	26

4	Gempa bumi	0	0	3
5	Banjir	6	62	17
6	Lain-lain	95	71	52
	Jumlah kejadian	400	499	421

Sumber : Laporan Bidang KL, 2023

#### 4.4 Capaian Rekonstruksi dan Rehabilitasi

BPBD telah membentuk Tim sesuai Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 180/..../HK/01/2023 tentang Pembentukan Tim Kajian dan Kebutuhan Serta Monitoring Pasca Bencana untuk merespon cepat masyarakat yang terdampak bencana. Adapun masyarakat yang terdampak setelah disurvei dilakukan kajian oleh Tim untuk diajukan kepada pimpinan untuk perencanaan bantuan yang layak diberikan kepada masyarakat yang terdampak bencana. Usulan yang terlah disetujui pimpinan BPBD diajukan ke TAPD Kabupaten Tabanan melalui bantuan tidak terduga yang tidak dapat direncanakan dengan sumber dana dari APBD Kabupaten senilai Rp. ....,00. Adapun masyarakat yang telah dibantu berikut ini.

No	Kecamatan	Desa	BTT tidak terencana	Ket
1	Kediri		Fasilitas umum, rumah masyarakat	
2	Tabanan		Fasilitas umum, rumah masyarakat	
3	Kerambitan		Fasilitas umum, rumah masyarakat	
4	Seltim		Fasilitas umum, rumah masyarakat	
5	Selemadeg		Fasilitas umum, rumah masyarakat	
6	Selbar		Fasilitas umum, rumah masyarakat	
7	Marga		Fasilitas umum, rumah masyarakat	
8	Baturiti		Fasilitas umum, rumah masyarakat	
9	Penebel		Fasilitas umum, rumah masyarakat	
10	Pupuan		Fasilitas umum, rumah masyarakat	

#### 4.5 Pengelolaan Aset

Aset BPBD Kabupaten Tabanan sudah dilakukan pengelolaan secara tertib sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan

Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Manajemen pengelolaan keuangan dan barang milik negara di BPBD Kabupaten Tabanan secara terus menerus melakukan penyempurnaan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Adapun data barang milik daerah sesuai KIB disajikan seperti tabel berikut ini:

Tabel Data BMD sesuai KIB

No	KIB	Uraian	Nilai/Rp
1	A	Tanah	190.600.000
2	B	Peralatan dan mesin	2.972.592.651
3	C	Gedung dan bangunan	257.565.000
4	D	Jalan, jaringan, dan irigasi	0
5	E	Aset tetap lainnya	9.00.000
6	F	Kontruksi dalam penggerjaan	0
<b>Jumlah</b>			<b>3.421.657.651</b>

Sumber : Laporan Aset, 2023

#### 4.6 Pengelolaan Keuangan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2023 maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2023. Data keuangan disajika seperti berikut ini.

Tabel Realisasi keuangan

No	Uraian	Pagu (Rp)	Perubahan	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	2.242.608.247		2.044.863.541	91,00
2	Belanja Barang dan Jasa	1.976.495.360		1.691.286.914	85,57
3	Belanja Hibah		0	0	0,00
4	Belanja Modal	24.939.800		18.950.000	75,98
<b>Jumlah</b>		<b>4.244.043.407</b>		<b>3.755.100.455</b>	<b>88,48</b>

Sumber : LRA, 2023

## V. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah mengumpulkan dan menyusun rencana evaluasi pengukuran kinerja baik SPM, indikator kinerja daerah, indikator kinerja utama, indikator kinerja program, indikator kinerja kegiatan, dan indikator kinerja keuangan.
- b. Capaian kinerja telah dievaluasi secara berkala (bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan).
- c. Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang diukur melalui SPM sudah mencapai 55,18%, capaian indikator kinerja utama (IKU) sudah mencapai sebesar 93,42% yang didukung oleh capaian indikator kinerja program (IKP) dalam Renja dengan rata-cata capaian *outcome* sebesar 100,0%, serta didukung dari capaian kinerja kegiatan (IKK) dengan rata-rata capaian output sebesar 100,0%.
- d. Capaian kinerja keuangan secara umum adalah 88,5% yang terdiri dari capaian kinerja belanja pegawai 91,0%, barang dan jasa sebesar 85,6%, capaian kinerja belanja modal sebesar 75,9% atau sudah mencapai target kinerja keuangan yang ditetapkan dalam DPA

### 5.2 Saran

Dari uraian hasil capaian kinerja tersebut di atas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut :

- a. Untuk meningkatkan kinerja pada setiap urusan yang menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka perlu dilakukan penajaman skala prioritas sasaran strategis yang akan dilaksanakan tahun berikutnya dan dukungan pendanaan pada masing-masing sasaran strategis sehingga kinerja dapat lebih dioptimalkan.
- b. Untuk mengatasi permasalahan yang masih sulit dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu ditingkatkan pelaksanaan koordinasi dengan berbagai *stakeholder* sehingga penurunan risiko bencana dapat terintegrasi dan berkelanjutan.

